



Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2023

<https://makassarkota.bps.go.id>

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2023

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA MAKASSAR TAHUN 2023

ISSN/ISBN : -

No Publikasi : 73710.2327

Katalog : 4101004.7371

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman : x + 60 halaman

Naskah : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar

Gambar Kulit : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar

Diterbitkan oleh : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar

Dicetak oleh : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar

*“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan
komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”*

TIM PENYUSUN

Pengarah : Drs. Abdul Hafid, MM

Penanggungjawab : Drs. Abdul Hafid, MM

Penyunting : Drs. Muhdar, MM

Pengolah Data dan Penulis Naskah: Wiena Hardian Pratama, SST

Penata Letak : Wiena Hardian Pratama, SST

<https://makassarkotabpu.go.id>

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar Tahun 2023 disusun sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen data yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.

Publikasi ini memuat berbagai indikator antara lain, Indikator Kependudukan, Fertilitas dan Keluarga Berencana, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Perumahan, dan indikator lainnya. Indikator-indikator tersebut secara umum dapat menggambarkan tingkat Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar.

Kami menyadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memuaskan semua konsumen data. Saran yang konstruktif tetap diharapkan guna penyempurnaan publikasi berikutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga publikasi ini dapat diterbitkan.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data dalam menganalisis dan merencanakan berbagai kegiatan untuk pembangunan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar.

Makassar, Desember 2023
**Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Makassar**



Drs. Abdul Hafid, MM
NIP. 196903251994011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ISTILAH TEKNIS.....	viii
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Ruang Lingkup.....	2
1.4. Konsep dan Definisi	3
1.5. Sumber Data	6
1.6. Sistematika Penulisan	6
KEPENDUDUKAN.....	9
2.1. Jumlah Penduduk.....	9
2.2. Pertumbuhan Penduduk.....	11
2.3. Penyebaran dan Kepadatan Penduduk.....	12
2.4. Komposisi Penduduk dan Beban Tanggungan	14
2.5. <i>Sex Ratio</i>	16
2.6. Status Perkawinan	17
FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA	21
3.1. Berat Bayi Ketika Dilahirkan.....	21
3.2. Pemakaian Alat/Cara KB	22
KESEHATAN	25
4.1. Keluhan Kesehatan	25
4.2. Derajat Kesehatan Masyarakat.....	26
4.3. Imunisasi Dasar Lengkap.....	27
4.4. Sarana Kesehatan	27
PENDIDIKAN	29
5.1. Sarana Pendidikan	29

5.2.	Rasio Murid Guru	30
5.3.	Rasio Murid Sekolah	31
5.4.	Angka Partisipasi Sekolah	32
5.5.	Kemampuan Membaca dan Menulis	33
5.6.	Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan/Dimiliki.....	35
KETENAGAKERJAAN		37
6.1.	Penduduk Menurut Jenis Kegiatan	38
6.2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka	38
6.3.	Lapangan Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan	39
6.4.	Status Pekerjaan	42
6.5.	Lama Jam Bekerja	43
PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		45
7.1.	Status Penguasaan Rumah.....	45
7.2.	Kondisi Fisik Bangunan Tempat Tinggal	46
7.3.	Fasilitas Sumber Air Mandi/Cuci/dll	49
7.4.	Fasilitas Buang Air Besar	50
INDIKATOR LAINNYA.....		53
8.1.	Pengeluaran Perkapita Sebulan	53
8.2.	Kemiskinan.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....		59

ISTILAH TEKNIS

Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk

Angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan dalam persentase dengan menggunakan rumus eksponensial.

Kepadatan Penduduk

Rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi

Rasio Dan Jenis Kelamin

Rasio antara banyaknya laki-laki dengan banyaknya perempuan dikalikan 100.

Metode Kontrasepsi

Cara/alat pencegah kehamilan.

Peserta Keluarga Berencana (Akseptor)

Orang yang mengikuti/memakai salah satu metode kontrasepsi.

Angka Kematian Bayi (AKB)

Besarnya probabilita bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan per seribu kelahiran).

Angka Harapan Hidup (AHH) Pada Waktu Lahir

Angka perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk.

Penduduk Usia Kerja

Penduduk yang berusia 10 tahun keatas.

Bekerja

Melakukan kegiatan/pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu yang lalu dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.

Angkatan Kerja

Penduduk usia 10 tahun keatas yang bekerja atau mencari pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia 10 tahun keatas.

Penganggur

Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

Dependency Ratio/Angka Beban Tanggungan (ABT).

Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (dibawah 15 tahun dan 64 tahun keatas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 tahun sampai 64 tahun) dikalikan 100.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Ukuran tingkat partisipasi sekolah penduduk menurut batas usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan.

Angka Buta Huruf

Ukuran persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang tidak bisa membaca dan menulis

Luas Lantai

Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah terus melakukan pembangunan diberbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu diperlukan monitoring untuk melihat capaian pembangunan tersebut dan pada dasarnya tujuan pokok dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud tidak hanya menyangkut kemampuan mencukupi kebutuhan yang bersifat materiil (sandang, papan, dan pangan), namun juga pemenuhan kebutuhan yang bersifat non materiil (pendidikan, kesehatan, sanitasi lingkungan, dll). Dengan pemenuhan kebutuhan ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia. Disisi lain sumber daya manusia dalam proses pembangunan dapat menjadi potensi dapat pula menjadi beban pembangunan.

Sejalan dengan pergantian masa dan kepemimpinan, apalagi sejak diterapkannya Undang- undang Otonomi Daerah telah mengubah sistem kebijakan negara ini dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan ini tentunya akan menimbulkan beberapa tantangan dan pertanyaan apakah dengan desentralisasi akan menjamin bahwa kepentingan rakyat banyak akan terpenuhi. Pertanyaan ini akan terjawab bila ada kesepakatan nasional untuk menyamakan persepsi mengenai pembangunan nasional. Dimana kesepakatan itu menjamin bahwa semua rakyat Indonesia sebagai warga negara berhak atas standar pembangunan manusia, seperti baca tulis, mendapat pendidikan yang setinggi-tingginya, hidup sehat, berpenghasilan yang layak, menghuni rumah yang memadai, beribadah dengan tenang sehingga kita bisa hidup sebagai bangsa dengan damai dan nyaman.

Dalam proses pembangunan senantiasa diupayakan peningkatan kemampuan dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dan juga menikmati hasil pembangunan, dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, pembangunan yang diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan perlu diukur tingkat keberhasilannya, dan untuk

mengukur pelaksanaan pembangunan secara luas yang meliputi unsur perencanaan, pemantauan dan evaluasi, tentunya diperlukan data statistik. Peranan data sangat penting karena data merupakan bahan baku bagi penyusunan statistik/indikator yang digunakan untuk melihat keadaan, memantau dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Disinilah peran serta BPS, khususnya dalam menyediakan data-data statistik yang diperlukan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan salah satu survei yang dilaksanakan oleh Badan pusat Statistik (BPS). Survei ini dilaksanakan tiap triwulan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan data yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Data yang dihasilkan dari survei ini meliputi informasi tentang demografi, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, keluarga berencana dan kemampuan daya beli masyarakat.

1.2. Tujuan

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2023 diterbitkan sebagai salah satu upaya mengantisipasi kebutuhan data guna pengukuran tingkat pembangunan di Kota Makassar. Publikasi ini berisi kumpulan indikator yang berkaitan dengan berbagai aspek kesejahteraan, yang diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar dan selanjutnya dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan. Disamping itu, gambaran tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pembangunan, yang dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan (rencana pembangunan pada masa yang akan datang).

1.3. Ruang Lingkup

Aspek kesejahteraan disadari memiliki dimensi yang sangat luas, tidak terbatas hanya menyangkut aspek materi seperti pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan perumahan, melainkan juga aspek non materi seperti pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan rasa aman. Karenanya guna melihat perkembangan taraf kesejahteraan

masyarakat perlu adanya fokus perhatian pada suatu indikator sebagai petunjuk yang memberikan indikasi tentang perkembangan tersebut. Dengan memperhatikan fokus dan pembatasan masalah, yang dicakup dalam indikator kesejahteraan ini meliputi aspek-aspek kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan aspek sosial ekonomi lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Indikator menurut jenisnya dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu: indikator masukan, indikator proses, dan indikator keluaran/dampak. Dalam publikasi ini ketiga indikator tersebut disajikan dengan ukuran-ukuran seperti jumlah, proporsi, rasio dan angka/tingkat. Penyajian indikator sebagian besar merupakan agregasi pada tingkat Kota Makassar, sementara beberapa indikator yang disajikan pada tingkat kecamatan.

1.4. Konsep dan Definisi

Untuk menghindari kesalahpahaman atas konsep yang digunakan maka sebelum data tersebut dikumpulkan terlebih dahulu ditentukan batasan terhadap keterangan yang akan dikumpulkan dan batasan tersebut diusahakan baku dan berlaku umum untuk para pemakai data.

Adapun konsep dan definisi tersebut adalah:

Rumah Tangga Biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu.

Rumah Tangga Khusus adalah orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan sekelompok orang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih. Rumah tangga khusus ini tidak dicakup dalam Susenas.

Kepadatan penduduk adalah rata-rata banyaknya penduduk perkilometer persegi.

Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan dikali 100.

Kawin adalah mempunyai istri/suami pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka

yang kawin sah secara hukum, tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.

Cerai Hidup adalah berpisah sebagai suami/istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ke tempat lain karena mencari pekerjaan.

Cerai Mati adalah ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.

Metode Kontrasepsi adalah alat/cara pencegah kehamilan.

Sekolah adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal mulai dari pendidikan sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.

Tidak atau Belum Pernah Sekolah adalah tidak atau belum pernah sekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Masih Bersekolah adalah sedang mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi.

Tidak Sekolah lagi adalah pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.

Melek Huruf adalah penduduk 10 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya.

Angka partisipasi Sekolah adalah ukuran yang menunjukkan tingkat partisipasi sekolah penduduk menurut batasan usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan.

Keluhan Kesehatan adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, atau hal lain. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Bekerja adalah Kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus selama seminggu yang lalu. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.

Menganggur adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran termasuk mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, telah diterima bekerja tetapi belum bekerja dan yang di PHK tetapi masih berhasrat untuk bekerja.

Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas.

Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya, termasuk juga mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah Penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan tersebut (angkatan kerja) dibandingkan dengan penduduk usia 15 tahun keatas.

$$TPAK = \frac{AK}{P_{15+}} \times 100$$

Keterangan : AK = Angkatan Kerja
P₁₅₊ = Penduduk usia 15 tahun keatas

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah Perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja.

$$TPT = \frac{TM}{AK} \times 100\%$$

Keterangan : PT = Tingkat Pengangguran Terbuka
TM = Jumlah Penduduk yang mencari pekerjaan
AK = Jumlah Angkatan Kerja

Angka Beban Tanggungan adalah Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia non produktif (usia dibawah 15 tahun dan usia 65 tahun keatas) dengan penduduk usia produktif (antara usia 15 tahun sampai usia 64 tahun) dikali 100.

Penduduk Muda adalah penduduk usia 0-14 tahun dibagi penduduk usia 15-64 tahun dikali 100.

Penduduk Tua adalah penduduk usia 65 tahun keatas dibagi penduduk usia 15-64 tahun dikali 100.

1.5. Sumber Data

Publikasi ini disusun dengan sumber data utama berasal dari hasil survei yang dilaksanakan oleh BPS yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) ditambah beberapa data lain yang terkait. Susenas merupakan survei dengan cakupan data sosial yang paling luas, dan sangat potensial untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat. Data yang dicakup dalam Susenas antara lain bidang kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan hidup, serta konsumsi rumah tangga.

Untuk itu, data Susenas sangat potensial untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat, ilustrasi mengenai keadaan berbagai komponen sosial dapat diketahui dengan menyusun data agregat berupa indikator seperti tingkat partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk, yang termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, persentase akseptor KB, persentase ibu melahirkan yang ditolong oleh tenaga medis, persentase rumahtangga yang menggunakan sumber air bersih, menikmati listrik dan rata-rata pengeluaran sebulan.

1.6. Sistematika Penulisan

Indikator kesejahteraan rakyat Kota Makassar disusun dalam tujuh bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, sebagai pendahuluan yang mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, konsep dan definisi, sumber data, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, tentang hal-hal kependudukan dan Keluarga Berencana, yaitu perkembangan penduduk, sebaran, dan kepadatan penduduk, komposisi penduduk, perkawinan dan rumah tangga, fertilitas dan keluarga berencana.

Bab ketiga, memuat tentang Fertilitas dan keluarga berencana yang berisi informasi tentang usia pernikahan pertama dan penggunaan alat kontrasepsi Keluarga Berencana.

Bab keempat, merupakan bab pembahasan mengenai kesehatan, yang meliputi status Kesehatan masyarakat, sarana Kesehatan, keluhan Kesehatan dan jaminan Kesehatan.

Bab kelima, membahas kondisi pendidikan yang mencakup sarana pendidikan, rasio murid-guru, rasio murid sekolah, angka partisipasi sekolah, kemampuan membaca dan menulis dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Bab keenam, menggambarkan kondisi ketenagakerjaan yang mencakup penduduk menurut jenis kegiatan, partisipasi angkatan kerja dan pengangguran, lapangan usaha, jenis pekerjaan dan status pekerjaan.

Bab ketujuh, merupakan bab yang membahas tingkat sosial yang berkaitan dengan perumahan dan lingkungan hidup, kondisi fisik bangunan tempat tinggal, utilitas dan fasilitas tempat tinggal.

Bab kedelapan, merupakan bab terakhir yang memberikan gambaran yang menyangkut ekonomi rumah tangga yang mencakup pengeluaran rumah tangga menurut golongan pengeluaran.

KEPENDUDUKAN

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan karena tidak saja menjadi sasaran tetapi juga menjadi pelaksana dari pembangunan. Oleh karena itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan, perkembangan penduduk perlu diarahkan sehingga mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang menguntungkan pembangunan.

Sementara itu, perluasan analisis khususnya bidang kependudukan akan terus berkembang seiring dengan makin majunya peradaban manusia. Oleh karena itu, tersedianya data kependudukan yang akurat dan tepat waktu sangat dibutuhkan oleh para perencana pembangunan maupun pelaku bisnis.

Pemerintah sangat membutuhkan data jumlah penduduk dan karakteristiknya, misalnya untuk merencanakan penyediaan sarana umum, perumahan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan tempat rekreasi. Sementara para pelaku bisnis memerlukan data penduduk untuk keperluan rencana produksi, pemasaran dan rekrutmen pekerja/karyawan. Dalam berbagai pihak, bagi lembaga swasta non profit data ini sangat dibutuhkan untuk bahan analisis suatu masalah tertentu.

Salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah masalah penduduk yang mencakup antara lain jumlah, komposisi dan distribusi penduduk. Oleh sebab itu dalam bab ini akan disajikan tentang jumlah dan pertumbuhan penduduk, penyebaran dan kepadatan penduduk, komposisi penduduk dan beban tanggungan, rasio jenis kelamin dan status perkawinan.

2.1. Jumlah Penduduk

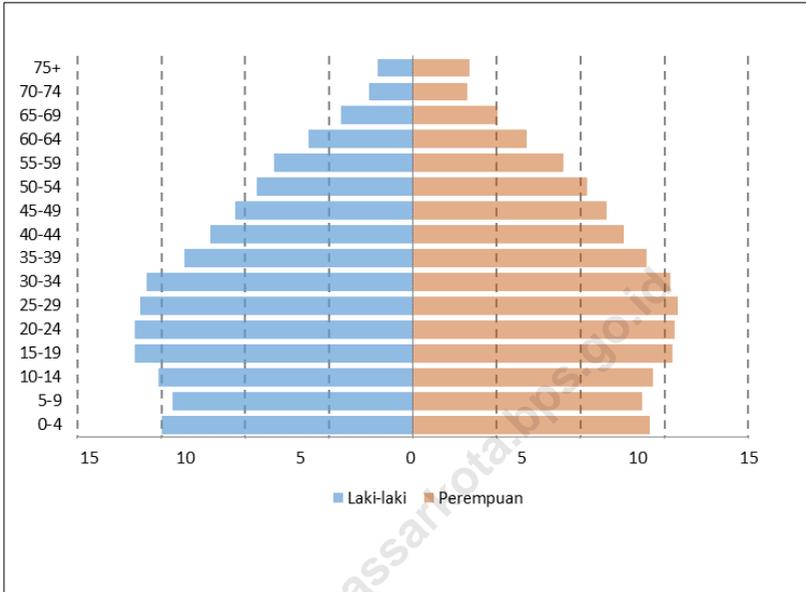
Jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2023 berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk sebanyak 1.436.626 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 715.646 jiwa dan perempuan 720.980 jiwa. Dengan demikian,

jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki dengan perbandingan jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 99,26. Yang berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 99 jiwa penduduk laki-laki. Penduduk ini tersebar pada 15 kecamatan terdiri dari 153 kelurahan dengan total luas 175,77 km², sehingga kepadatan penduduk di Kota Makassar pada tahun 2023 sekitar 8.173 jiwa per km².

Tabel 2.1
Penduduk Kota Makassar Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2023

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	59.802	56.475	116.277
5-9	57.340	54.595	111.935
10-14	60.800	57.199	117.999
15-19	66.401	61.941	128.342
20-24	66.423	62.481	128.904
25-29	65.072	63.296	128.368
30-34	63.462	61.397	124.859
35-39	54.446	55.615	110.061
40-44	48.368	50.407	98.775
45-49	42.309	46.109	88.418
50-54	37.325	41.593	78.918
55-59	33.078	35.995	69.073
60-64	24.855	27.158	52.013
65-69	17.189	20.259	37.448
70-74	10.327	13.039	23.366
75+	8.449	13.421	21.870
Jumlah	715.646	720.980	1.436.626

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk Tahun 2020-2023



Gambar 2.1
Piramida Penduduk Kota Makassar 2023

2.2. Pertumbuhan Penduduk

Usaha untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk selalu menjurus kepada pengkajian bagaimana cara menurunkan tingkat fertilitas. Hal ini dikarenakan fertilitas merupakan salah satu komponen utama yang berpengaruh terhadap banyaknya penduduk.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar untuk periode 2022 dan 2023 sebesar 0,31 persen. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk untuk provinsi Sulawesi Selatan, adalah sebesar 0,94 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pertumbuhan Penduduk Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2022 dan 2023

Wilayah	2022	2023	Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Makassar	1.432.189	1.436.626	0,31
Provinsi Sulawesi Selatan	9.225.747	9.312.019	0,94

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk Tahun 2020-2023

2.3. Penyebaran dan Kepadatan Penduduk

Konsekuensi yang timbul dari permasalahan berkembangnya penduduk adalah bagaimana penyebarannya, apakah terkonsentrasi pada suatu wilayah atau tersebar normal merata di seluruh wilayah. Ukuran sebaran dan kepadatan penduduk yang ideal sulit untuk ditentukan karena bergantung pada potensi yang dimiliki suatu wilayah serta kemampuan penduduk dalam memanfaatkan potensi yang ada. Umumnya konsentrasi penduduk yang tinggi akan sangat rawan terhadap konflik sosial, selain itu juga menyulitkan pemerintah dalam penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Sebaliknya konsentrasi penduduk yang rendah akan menyebabkan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat menjadi relatif mudah

Jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2023 tercatat 1.436.626 jiwa yang tersebar pada 15 kecamatan. Distribusi penduduk menurut kecamatan menunjukkan keadaan sebaran yang tidak merata. Tabel 2.3 memperlihatkan bahwa perbedaan distribusi penduduk setiap kecamatan dengan persentase luas wilayah mengakibatkan kepadatan penduduk setiap kecamatan juga berbeda-beda. Secara keseluruhan kepadatan penduduk di Kota Makassar yaitu sekitar 8.173 jiwa/km². Kepadatan penduduk terendah sebesar 3.248 jiwa/km² di Kecamatan Tamalanrea, sedangkan kepadatan tertinggi mencapai 32.690 jiwa/km² di Kecamatan Makassar.

Terdapat empat kecamatan yang wilayahnya cukup luas, masing-masing di atas 10 persen dari luas wilayah Kota Makassar. Sementara terdapat tujuh kecamatan lainnya yang memiliki luas wilayah masing-masing kurang dari 2 persen. Empat wilayah kecamatan terluas di Kota Makassar berturut-turut adalah Biringkanya 48,22 Km², Tamalanrea 31,84 Km², Manggala 24,14 Km², dan Tamalate 20,21 Km².

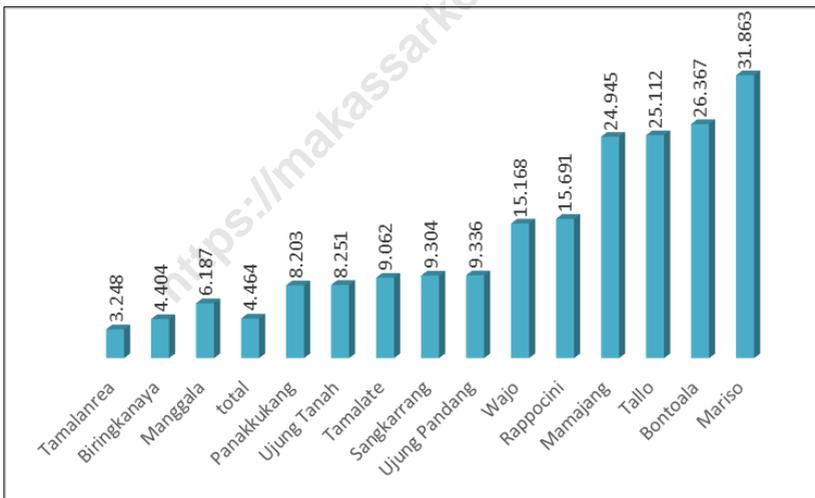
Tabel 2.3
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kota Makassar menurut Kecamatan
Tahun 2023

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	(%)	Penduduk	(%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mariso	1,82	1,04	57.990	4,04	31.863
Mamajang	2,25	1,28	56.127	3,91	24.945
Tamalate	20,21	11,50	183.147	12,75	9.062
Rappocini	9,23	5,25	144.831	10,08	15.691
Makassar	2,52	1,43	82.378	5,73	32.690
Ujung Pandang	2,63	1,50	24.553	1,71	9.336
Wajo	1,99	1,13	30.185	2,10	15.168
Bontoala	2,10	1,19	55.370	3,85	26.367
Ujung Tanah	4,40	2,50	36.303	2,53	8.251
Sangkarrang	1,54	0,88	14.328	1,00	9.304
Tallo	5,83	3,32	146.401	10,19	25.112
Panakkukang	17,05	9,70	139.868	9,74	8.203
Manggala	24,14	13,73	149.365	10,40	6.187
Biringkaya	48,22	27,43	212.367	14,78	4.404
Tamalanrea	31,84	18,11	103.413	7,20	3.248
Jumlah	175,77	100,00	1.436.626	100,00	8.173

Sumber : BPS, Makassar Dalam Angka 2023

Pada Tabel 2.3 terdapat distribusi sebaran penduduk menurut kecamatan. Distribusi penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Biringkanaya sekitar 14,78 persen, Tamalate 12,75 persen, Manggala 10,40 persen, Tallo 10,19 persen, dan Rappocini 10,08 persen.

Karena pola distribusi penduduk dan luas wilayah antar kecamatan berbeda, maka tingkat kepadatan yang dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk terhadap luas wilayah, memiliki pola yang berbeda pula. Pola yang terbentuk menunjukkan bahwa wilayah kota lama yang merupakan pusat niaga dan jasa memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi. Untuk itu sangatlah logis apabila pengembangan wilayah pemukiman penduduk dapat diarahkan pada wilayah dengan tingkat kepadatan yang masih rendah, seperti pada kecamatan Biring Kanaya, Tamalanrea, dan Manggala.



Gambar 2.2
Distribusi Kepadatan Penduduk Kota Makassar per Kecamatan
Tahun 2023

2.4. Komposisi Penduduk dan Beban Tanggungan

Selain jumlah, pertumbuhan dan kepadatan penduduk, indikator lainnya yang perlu diketahui adalah komposisi penduduk, seperti komposisi

penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Indikator ini menjadi penting sebagai petunjuk perkembangan taraf kesejahteraan karena kejadian demografis maupun karakteristiknya berbeda menurut umur dan jenis kelamin baik untuk kejadian kelahiran, kematian maupun perpindahan penduduk. Komposisi penduduk menurut umur dapat menggambarkan besarnya tingkat kelahiran yakni dengan melihat perubahan persentase penduduk usia muda. Indikator turunan lainnya yang dapat digambarkan dari komposisi kelompok umur adalah angka beban ketergantungan (ABK) yaitu perbandingan antara banyaknya penduduk umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas yang dianggap sebagai usia tidak produktif terhadap penduduk umur 15-64 tahun yang dianggap sebagai usia produktif.

Dengan mengetahui struktur umur penduduk, kita dapat mengukur besarnya *dependency ratio* (Angka Beban Ketergantungan), yang selanjutnya disebut “beban ketergantungan”. Beban ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang secara ekonomis tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun) dengan jumlah penduduk yang secara ekonomis dianggap produktif (usia 15-64 tahun). Sehingga semakin kecil porsi penduduk yang berusia non produktif, maka semakin kecil pula angka beban ketergantungan itu dan sebaliknya semakin besar porsi penduduk berusia non produktif, maka semakin besar pula angka beban ketergantungan tersebut.

Dari Tabel 2.4 di bawah ini memperlihatkan beban ketergantungan penduduk Kota Makassar pada tahun 2022 sebesar 42,94, kemudian turun menjadi 42,56 pada tahun 2023. Angka tersebut memberikan gambaran bahwa pada tahun 2023, setiap 100 penduduk produktif di Kota Makassar harus menanggung secara ekonomis sekitar 42 hingga 43 penduduk usia tidak produktif. Turunnya angka beban ketergantungan pada tahun 2023 disebabkan meningkatnya penduduk usia produktif 15-64 tahun dan menurunnya jumlah penduduk berusia 0-4 tahun dan 65 tahun ke atas.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2022 dan 2023 beban ketergantungan laki-laki lebih besar daripada perempuan. Pada 2023, beban ketergantungan laki-laki sebesar 42,63 dan beban ketergantungan perempuan sebesar 42,49. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih banyak yang berusia produktif.

Tabel 2.4

Angka Beban Ketergantungan Kota Makassar Tahun 2022 – 2023 (%)

Angka Beban Ketergantungan	2022			2023		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penduduk Muda (0-14 tahun/15-64 tahun)	36,16	33,81	34,98	35,47	33,26	34,36
Penduduk Tua (65+/15-64 tahun)	6,96	8,95	7,96	7,17	9,23	8,20
Jumlah	43,12	42,76	42,94	42,63	42,49	42,56

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk 2020-2023

Jika usia tidak produktif dibedakan antara usia muda (0-14 tahun) dan usia tua (usia 65+), maka angka beban ketergantungan dibedakan menjadi angka beban ketergantungan penduduk muda dan angka beban ketergantungan penduduk tua. Dalam kurun 2022 - 2023 angka beban ketergantungan penduduk muda mengalami penurunan sebesar 0,62 persen sedangkan angka beban ketergantungan penduduk tua meningkat sebesar 0,24 persen. Namun demikian penduduk muda masih dominan sebagai beban ketergantungan penduduk usia produktif, karena angka beban ketergantungan penduduk tua relatif kecil, yaitu 7,96 pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 sebesar 8,20.

2.5. Sex Ratio

Sex Ratio (ratio jenis kelamin) penduduk Kota Makassar pada tahun 2023 sebesar 99,26, artinya di Kota Makassar terdapat sekitar 99 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Tabel 2.5 menunjukkan bahwa *sex ratio* pada kelompok umur 0-14 tahun di atas 100, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Sebaliknya pada kelompok umur/usia sedang (15-64) dan kelompok

penduduk tua (65+) *sex ration*nya dibawah 100, yang berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin
Menurut Kelompok Umur di Kota Makassar Tahun 2023

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 14	177.942	168.269	105,75
15 - 64	501.739	505.992	99,12
65 +	35.965	46.719	76,98
Jumlah	715.646	720.980	99,26

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk 2020-2023

Pola yang terbentuk dari komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin adalah rasio jenis kelamin penduduk usia dewasa lebih rendah dari penduduk usia muda. Atau dengan kata lain, pada kelompok usia muda jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan. Sedangkan pada kelompok usia dewasa, jumlah laki-lakinya lebih sedikit dibanding jumlah perempuan. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat migrasi dan rendahnya tingkat harapan hidup penduduk laki-laki dibanding perempuan.

2.6. Status Perkawinan

Perkawinan merupakan awal terbentuknya suatu keluarga. Keluarga adalah suatu kelompok masyarakat terkecil yang biasanya terdiri dari suami istri dan anak dan ditandai dengan adanya hubungan darah. Namun karena suatu hal, adakalanya keluarga dapat hanya terdiri dari suami-isteri bagi keluarga yang baru terbentuk, ibu dan anak, atau ayah dan anak. Status perkawinan dibedakan menjadi empat kelompok, yakni belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati. Perkembangan atau perubahan status perkawinan dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan, kaitannya dengan tingkat kelahiran dan hubungan sosial. Umumnya, suatu

daerah dengan proporsi kawin yang tinggi cenderung memiliki jumlah kelahiran yang tinggi. Kemudian tingginya proporsi penduduk berstatus cerai hidup merupakan gambaran tingginya tingkat perceraian.

Penduduk menurut status perkawinan dapat dibedakan menurut dua kelompok yaitu belum kawin dan pernah kawin. Pernah kawin meliputi mereka yang kawin, cerai hidup dan cerai mati. Pengertian kawin yang dicakup dalam survei ini adalah penduduk yang terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin secara sah/resmi tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekitar dianggap sebagai suami istri.

Pada Tabel 2.6 ditampilkan persentase penduduk menurut status perkawinan penduduk Kota Makassar usia 15-49 tahun menurut status perkawinan tahun 2022 dan 2023. Nampak bahwa persentase penduduk yang berstatus belum kawin mengalami peningkatan dari 42,58 persen menjadi 53,03 persen. Sementara itu persentase penduduk berstatus kawin mengalami penurunan sebesar 4,5 persen selama tahun 2022-2023, yaitu dari 48,58 persen menjadi 44,08 persen. Persentase penduduk yang berstatus cerai hidup/mati juga menurun dari 8,84 persen menjadi 2,88 persen.

Tabel 2.6

Persentase Penduduk Usia 15-49 Tahun Menurut Status Perkawinan Kota Makassar 2022-2023

Status Perkawinan	2022			2023		
	L	P	L+ P	L	P	L+ P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belum Kawin	45,76	39,56	42,58	57,11	49,03	53,03
Kawin	49,63	47,58	48,58	40,64	47,46	44,08
Cerai hidup/mati	4,61	12,86	8,84	2,25	3,51	2,88

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2022-2023

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki yang berstatus kawin dan cerai hidup/mati mengalami penurunan pada tahun 2023 yaitu sebesar 8,99 persen dan 2,36 persen. Begitu pula pada penduduk perempuan juga mengalami penurunan sebesar 0,12 persen yang berstatus kawin dan 9,35 persen yang berstatus cerai hidup/mati. Selama tahun 2022-2023, persentase penduduk belum kawin di Kota Makassar mengalami peningkatan sebesar 10,45 persen. Persentase peningkatan terbesar terjadi pada penduduk laki-laki sebesar 11,35 persen.

<https://makassarkota.bps.go.id>

FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA

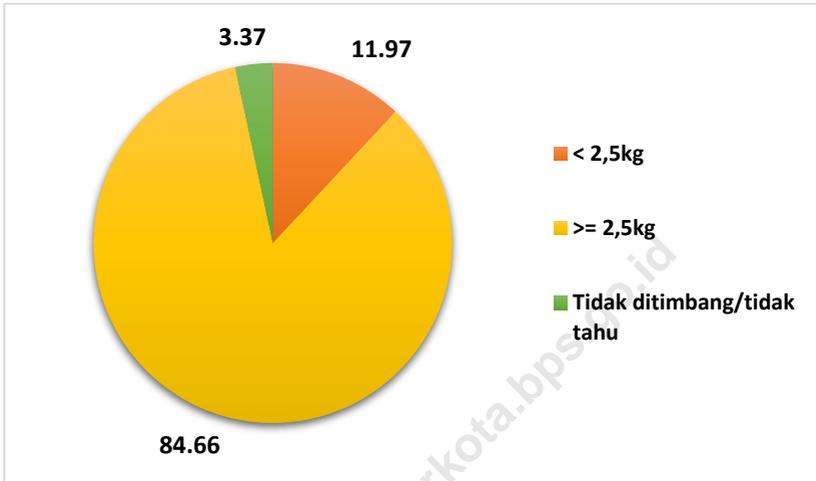
Salah satu langkah yang dapat diambil untuk menanggulangi masalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk adalah dengan cara menekan tingkat fertilitas, yaitu melalui pembatasan dan penjarangan kelahiran. Proses ini dilaksanakan dengan cara mengajak masyarakat, khususnya pasangan usia subur untuk ikut berperan aktif dalam gerakan keluarga berencana. Gerakan ini bukan sekedar untuk menekan laju pertumbuhan penduduk tetapi lebih dari itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Fertilitas dalam demografi didefinisikan sebagai kemampuan seorang wanita untuk menghasilkan anak lahir hidup. Fertilitas (kelahiran) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk selain mortalitas (kematian) dan migrasi (perpindahan). Kondisi fertilitas dapat dilihat dari sisi wanita yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. BPS membatasi pada wanita pernah kawin berusia 15 hingga 49 tahun dikarenakan usia tersebut merupakan usia subur bagi seorang wanita sehingga kemungkinan seorang wanita dapat melahirkan anak cukup besar dalam rentang usia tersebut.

3.1. Berat Bayi Ketika Dilahirkan

Bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu tentu memiliki kondisi fisik yang berbeda-beda. Bayi yang lahir dengan kondisi fisik yang bagus memiliki peluang untuk hidup lebih sehat. Salah satu indikator untuk melihat kondisi bayi adalah dengan mengukur berat bayi saat dilahirkan. Bayi yang sehat memiliki berat badan 2,5kg atau lebih, sedangkan bayi dengan berat kurang dari 2,5kg membutuhkan perawatan yang lebih agar beratnya bisa kembali ideal dan sehat.

Dari gambar 3.1 dapat dilihat bahwa persentase wanita usia 15-49 tahun yang melahirkan bayi dengan berat 2,5kg atau lebih adalah 84,66 persen. Sedangkan wanita yang melahirkan bayi dengan berat kurang dari 2,5kg adalah 11,97 persen. Sisanya sebesar 3,37 persen tidak menimbang/tidak tahu berat bayinya saat dilahirkan.



Gambar 3.1

Persentase Perempuan Pernah Kawin berumur 15-49 Tahun dan Berat Bayi Ketika Dilahirkan di Kota Makassar Tahun 2023

3.2. Pemakaian Alat/Cara KB

Salah satu tujuan program pemerintah untuk mengendalikan fertilitas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pembatasan dan pengaturan jarak kelahiran. Program KB merupakan program yang dikeluarkan pemerintahan untuk membatasi jumlah kelahiran. Hal tersebut dimaksudkan agar beban yang harus ditanggung oleh rumah tangga tidak terlampaui besar atau sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Jumlah anak yang terbatas juga akan sangat menguntungkan karena ibu dapat memfokuskan perhatian kepada anak-anak mereka yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup anak tersebut. Dalam jangka panjang, diharapkan dari rumah tangga yang terprogram dengan baik tersebut akan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk kelanjutan pembangunan di masa yang akan datang.

Indikasi makin meningkatnya partisipasi masyarakat pada gerakan keluarga berencana untuk membatasi atau menjarangkan kelahiran salah

satunya dengan program KB yang bertujuan selain menurunkan tingkat fertilitas, juga untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rumah tangga.

Tabel 3.1
Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin Menurut Penggunaan Kontrasepsi di Kota Makassar, 2022-2023

Tahun	Pengguna/Memakai alat/Cara KB		
	Pernah Menggunakan Alat/Cara KB	Sedang Menggunakan Alat/Cara KB	Tidak Pernah Menggunakan
(1)	(2)	(3)	(4)
2022	17,06	38,26	44,68
2023	23,97	38,54	37,49

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar Tahun 2022-2023

Tabel 3.1 menyajikan keikutsertaan wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin menurut penggunaan alat kontrasepsi. Pada tahun 2023, persentase wanita kawin usia 15-49 tahun yang sedang menggunakan alat/cara KB sebesar 38,54 persen. Angka ini lebih tinggi sedikit dibanding tahun 2022 yang mencapai 38,26 persen. Sedangkan untuk persentase wanita kawin usia 15-49 tahun yang tidak pernah menggunakan kontrasepsi menurun sebesar 7,19 persen pada tahun 2023. Artinya semakin banyak wanita kawin usia 15-49 tahun yang mengikuti program KB dan menggunakan kontrasepsi.

KESEHATAN

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata, dengan harapan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Upaya perbaikan taraf kesehatan masyarakat dapat ditempuh melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang berkesinambungan baik dari segi mutu maupun jumlahnya, seperti rumah sakit, puskesmas, dokter dan tenaga medis lainnya. Pelayanan kesehatan diharapkan semakin baik dengan fasilitas kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat. Sehingga semua lapisan masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dengan mudah, murah dan merata.

Menurut perencanaan program dan dampaknya, indikator kesehatan terdiri dari indikator upaya perbaikan kesehatan dan status kesehatan, serta indikator penunjang. Indikator kesehatan tersebut yang dapat diturunkan dari data Susenas diantaranya adalah persentase persalinan ditolong tenaga medis, persentase bayi/balita diberi ASI, persentase keluhan kesehatan, dan jumlah hari sakit.

4.1. Keluhan Kesehatan

Keluhan kesehatan adalah keadaan dimana seseorang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan dan hal lain, termasuk juga mereka yang menderita penyakit kronis dan belum sembuh.

Tabel 4.1 dari data Hasil Susenas 2023 menunjukkan bahwa penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 5,42 persen. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022 yang mengalami keluhan kesehatan mencapai 10,81 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 penduduk Kota Makassar memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik daripada saat tahun 2022.

Tabel 4.1
Persentase Penduduk Kota Makassar yang Mengalami Keluhan Kesehatan di Kota Makassar 2022 – 2023

Tahun	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	L+P (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2022	10,93	10,69	10,81
2023	6,05	4,81	5,42

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar Tahun 2022-2023

4.2. Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam bidang kesehatan. Dengan adanya derajat kesehatan, akan tergambar masalah kesehatan yang sedang dihadapi suatu wilayah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, antara lain faktor keturunan/genetis, pelayanan kesehatan, perilaku, dan lingkungan.

Angka Harapan Hidup (AHH) disebut juga lama hidup seseorang/sekelompok orang yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program-program kesehatan. Selain itu, AHH merupakan suatu alat evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH yang rendah di suatu wilayah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 4.2
Angka Harapan Hidup Penduduk Kota Makassar Tahun 2021-2023

Tahun	AHH (Tahun)
(1)	(2)
2021	72,13
2022	72,40
2023	72,60

Sumber : BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar Tahun 2021-2023

4.3. Imunisasi Dasar Lengkap

Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kesehatan bayi adalah dengan imunisasi. Imunisasi diberikan kepada bayi dengan tujuan untuk membentuk daya tahan tubuh bayi agar mampu melawan virus/bakteri yang berbahaya. Saat ini imunisasi bisa didapatkan secara gratis di puskesmas maupun berbayar di rumah sakit/klinik dokter. Imunisasi yang baik adalah imunisasi dasar yang lengkap diberikan kepada bayi, yang meliputi 1 kali BCG, 3 kali Polio, 3 kali DPT, 1 kali Campak, dan 3 kali Hepatitis B. Pemberian imunisasi dasar lengkap dapat menggambarkan tingkat kesadaran si ibu terhadap kesehatan anaknya.

Tabel 4.3
Persentase Balita (0-59 bulan) yang Pernah Imunisasi Dasar Lengkap di Kota Makassar Tahun 2022-2023

Tahun	Persentase
(1)	(2)
2022	82,44
2023	59,25

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar Tahun 2022-2023

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa persentase balita (0-59 bulan) yang pernah imunisasi dasar lengkap pada tahun 2023 adalah 59,25 persen, turun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 82,44 persen.

4.4. Sarana Kesehatan

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat adalah penyediaan sarana kesehatan yang memadai. Dengan semakin meningkatnya sarana tersebut maka setiap warga masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk mendapat pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Puskesmas adalah satu unit pelayanan fungsional yang fungsi utamanya adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama. Wilayah kerjanya meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan atau sebagian dari kecamatan yang biasanya dibangun

dengan melihat kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografi dan infrastruktur lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya tidak semua puskesmas dapat menjangkau semua penduduk yang dibebankan dalam wilayahnya, oleh sebab itu harus ditunjang dengan fasilitas layanan kesehatan lainnya. Fasilitas layanan kesehatan lainnya yang dimaksud adalah Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Posyandu. Keberadaan kedua fasilitas ini sangat membantu puskesmas dalam rangka memberikan pelayanan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Selain pengadaan fasilitas kesehatan, juga perlu ditunjang dengan kualitas pelayanan. Untuk itu keberadaan tenaga kesehatan yang berkualitas sangat diperlukan. Kualitas tenaga kesehatan sangat ditentukan oleh spesifikasi pendidikan yang dimiliki yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang akan diberikan pada masyarakat.

Tabel 4.4

Banyaknya Sarana Kesehatan menurut Jenisnya di Kota Makassar 2023

Fasilitas Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)
Rumah Sakit Umum	26
Rumah Sakit Bersalin	27
Puskesmas	49
Poliklinik	57
Apotek	115

Sumber : BPS, Makassar Dalam Angka 2023

PENDIDIKAN

Sumber daya manusia sangat penting peranannya dalam proses pembangunan. Untuk itu, pembangunan yang dilakukan bermuara pada pembangunan manusia. Salah satu komponen dalam pembangunan manusia adalah peningkatan di bidang pendidikan, karena merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Program pendidikan mempunyai andil yang sangat besar terhadap kemajuan sosial ekonomi bangsa. Pembangunan pendidikan pada dasarnya dilakukan dalam empat strategi pokok yaitu pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan dan efisiensi pengelolaan.

Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah, penambahan tenaga pengajar. Relevansi pendidikan melalui konsep *“link and match”*, yaitu relevansi strategi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Pendidikan hendaknya menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai tuntutan zaman. Dan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan supaya pendidikan diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan keadaan bidang pendidikan secara umum di Kota Makassar diantaranya adalah kemampuan membaca dan menulis, partisipasi sekolah, pendidikan yang ditamatkan, dan ketersediaan sarana pendidikan.

5.1. Sarana Pendidikan

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan penting untuk terus diupayakan sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah penduduk dan diberlakukannya program wajib belajar 9 tahun. Upaya ini ditujukan agar pelayanan pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan

menuju standar yang diharapkan. Ketersediaan sarana pendidikan yang paling dasar dapat ditunjukkan melalui indikator rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah. Meski memiliki kelemahan, yakni indikator bersifat kuantitatif bukan kualitatif, perubahan yang terjadi dalam indikator ini diharapkan dapat memberikan gambaran kemajuan pembangunan sarana pendidikan.

5.2. Rasio Murid Guru

Rasio murid Guru (RMG) merupakan perbandingan jumlah murid dengan jumlah guru pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Rasio murid guru menggambarkan rata-rata banyaknya murid yang diajar oleh seorang guru. Ada kecenderungan makin sedikit murid yang ditangani seorang guru semakin baik proses belajar mengajar. Hal ini karena guru bisa dengan mudah memantau murid yang diajarnya di dalam kelas dan juga mudah mengukur prestasi belajar setiap siswa. Meskipun demikian, belum ada patokan tentang rasio murid guru yang ideal dalam proses belajar mengajar.

Tabel 5.1
Rasio Murid Guru di Kota Makassar Tahun Ajaran 2022/2023

Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/Sederajat	144.305	8.498	16,98
SMP/Sederajat	68.144	4.682	14,55
SMA/Sederajat	71.838	4.981	14,42

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kota Makassar (Makassar Dalam Angka 2023)

Tabel 5.1 menunjukkan nilai Rasio Murid Guru (RMG) pada jenjang pendidikan SD/ sederajat pada tahun ajaran 2022/2023 yaitu 16,98 yang menunjukkan bahwa setiap guru mengajar sekitar 17 murid. Selanjutnya RMG pada jenjang pendidikan SMP /sederajat sekitar 14,55 atau terdapat sekitar 14 sampai 15 murid yang diajar oleh seorang guru. Sementara itu,

RMG pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat sekitar 14,42 atau terdapat sekitar 14 sampai 15 murid yang diajar oleh seorang guru.

5.3. Rasio Murid Sekolah

Rasio murid sekolah (RMS) pada setiap jenjang pendidikan diperoleh dengan membandingkan jumlah murid dengan jumlah sekolah. Rasio murid sekolah menggambarkan rata-rata banyaknya murid pada setiap sekolah dalam setiap jenjang pendidikan. Rasio ini diperlukan untuk mengetahui kepadatan murid pada setiap sekolah yang salah satu kegunaannya adalah untuk melihat layak tidaknya menambah gedung sekolah di suatu wilayah.

Pada tahun ajaran 2022/2023 RMS pada jenjang SD/ sederajat sebanyak 266 murid per sekolah kemudian untuk jenjang SMP/ sederajat sebanyak 246 murid per sekolah dan untuk rasio murid sekolah pada jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat SMA/ sederajat sebanyak 292 murid/ siswa setiap sekolah.

Besarnya rasio murid sekolah pada setiap jenjang pendidikan sekolah menunjukkan adanya indikasi semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Hal ini tentunya sangat beralasan sekali karena hampir seluruh aspek kehidupan memerlukan pendidikan yang memadai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2
Rasio Murid Sekolah di Kota Makassar Tahun Ajaran 2022/2023

Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Sekolah	Rasio Murid Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/ Sederajat	144.305	543	266
SMP/ Sederajat	68.144	277	246
SMA/ Sederajat	71.838	246	292

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kota Makassar (Makassar Dalam Angka 2023)

5.4. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan proporsi penduduk kelompok usia tertentu yang masih duduk di bangku sekolah. Indikator ini menunjukkan keadaan proses pendidikan yang diimplementasikan di masyarakat. Angka partisipasi sekolah yang disajikan dalam bab ini menunjukkan perbandingan antara banyaknya murid pada suatu jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut.

Tabel 5.3

Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun, 13-15 Tahun, 16-18 Tahun, dan 19-23 Tahun di Kota Makassar Tahun 2023

Jenis Kelamin	Kelompok Umur			
	7-12	13-15	16-18	19-23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	98,71	88,04	70,78	65,44
Perempuan	100,00	99,58	71,52	54,66
Jumlah	99,34	93,88	71,19	59,94

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar Tahun 2023

Tabel 5.3 memperlihatkan angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-23 tahun di Kota Makassar. Tampak pola partisipasi sekolah penduduk Kota Makassar yang menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan semakin kecil partisipasi sekolahnya. APS perempuan pada hampir semua kelompok usia lebih tinggi dibanding APS laki-laki. Hal ini menunjukkan kesadaran pentingnya pendidikan bagi perempuan lebih tinggi daripada laki-laki.

Partisipasi sekolah dari penduduk usia 7-12 tahun di tahun 2023 mencapai 99,34 persen, ini dapat diartikan dari 100 penduduk usia 7-12 tahun ada sekitar 99 penduduk yang masih aktif bersekolah. Untuk penduduk usia ini, partisipasi sekolah penduduk perempuan lebih besar dari pada laki-laki yaitu 100 persen perempuan dan laki-laki sekitar 98,71 persen.

Pada kelompok umur 13-15 tahun, partisipasi sekolahnya lebih rendah dari partisipasi sekolah pada kelompok usia 7-12 tahun. Partisipasi sekolah pada kelompok ini mencapai sekitar 93,88 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, partisipasi penduduk perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, yaitu 99,58 persen untuk perempuan dan 88,04 persen untuk laki-laki.

Pada kelompok umur 16-18 tahun, partisipasi sekolahnya juga nampak lebih rendah dibandingkan pada kelompok umur 13-15 tahun. Partisipasi sekolah pada kelompok ini hanya mencapai 71,19 persen. Pada kelompok umur ini, angka partisipasi sekolah perempuan juga lebih tinggi dibanding angka partisipasi sekolah laki-laki. Angka partisipasi sekolah laki-laki sekitar 70,78 persen dan perempuan sekitar 71,52 persen.

Pada kelompok umur 19-23 tahun, partisipasi sekolah juga lebih sedikit jika dibandingkan kelompok umur di bawahnya, yaitu hanya sebesar 59,94 persen saja. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh faktor ekonomi dari penduduk Kota Makassar. Untuk penduduk usia 7-12, 13-15, dan 16-18 angka partisipasi sekolahnya masih cukup tinggi karena ada program sekolah gratis. Sedangkan untuk penduduk usia 19-23 tahun angka partisipasi sekolahnya rendah karena di usia tersebut sudah memasuki jenjang perguruan tinggi dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga di usia tersebut lebih banyak penduduk yang memilih bekerja saja dibandingkan melanjutkan sekolah.

5.5. Kemampuan Membaca dan Menulis

Kemampuan membaca dan menulis atau tingkat buta huruf terutama untuk penduduk yang berumur 15 tahun ke atas merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan program pembangunan di bidang pendidikan. Sebab kalau di suatu wilayah masih cukup banyak penduduk yang buta huruf, jelas merupakan indikator ketertinggalan, sebab seseorang yang buta huruf relatif akan lebih sulit untuk menerima informasi dan pengetahuan baru.

Kemampuan membaca dan menulis merupakan kebutuhan mendasar, tanpa kepandaian tersebut sulit rasanya untuk mengikuti perkembangan informasi sosial ekonomi global. Ukuran ini merupakan

indikator dasar mutu sumber daya manusia yang di ukur dalam aspek pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin tinggi sumber daya manusia suatu masyarakat.

Melek huruf yang dimaksud adalah jika seseorang yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Yang dimaksud huruf lainnya misalnya huruf Arab, Bugis/Makassar, Jawa, Cina dan sebagainya. Sedangkan seseorang yang hanya dapat membaca atau menulis saja belum dianggap sebagai melek huruf.

Tabel 5.4
Kemampuan Baca Tulis Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kota Makassar
2022-2023

Kemampuan Baca Tulis	2022			2023		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Huruf Latin/Alfabet	99,00	98,57	98,78	99,59	98,30	98,93
Huruf Arab/Lainnya	44,01	44,30	44,16	58,64	57,63	58,12

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar Tahun 2022-2023

Tabel 5.4 menunjukkan tingkat kemampuan baca dan tulis penduduk berumur 15 tahun ke atas. Secara umum, selama kurun 2022-2023 kemampuan dapat membaca dan menulis penduduk meningkat. Hal itu ditandai dengan meningkatnya persentase penduduk yang dapat membaca dan menulis baik huruf latin maupun huruf lainnya serta menurunnya angka buta huruf. Tahun 2023 sekitar 98,93 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin, atau naik sekitar 0,15 persen dari keadaan tahun 2022 yang mencapai 98,78 persen.

Telaah lebih lanjut menurut jenis kelamin, nampak bahwa kemampuan membaca dan menulis penduduk perempuan cenderung lebih

rendah dari laki-laki. Penduduk perempuan yang bisa membaca dan menulis huruf latin sekitar 98,30 persen tahun 2023 dan penduduk laki-laki yang dapat membaca dan menulis huruf latin sekitar 99,59 persen. Masih adanya penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis seringkali disebabkan pada usia lanjut yang sudah enggan untuk belajar membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya karena faktor usia.

5.6. Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan/Dimiliki

Tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Sehingga potensi sumber daya manusia di suatu wilayah dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Tabel 5.5

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Yang Ditamatkan di Kota Makassar Tahun 2023

Pendidikan Yang Ditamatkan	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak punya Ijazah SD	4,18	4,96	4,58
SD/ sederajat	12,86	13,32	13,09
SMP/ sederajat	20,12	19,59	19,85
SMA/ sederajat ke atas	62,84	62,13	62,48

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar Tahun 2022-2023

Tabel 5.5 memperlihatkan penduduk Kota Makassar usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2023. Bahwa sebagai ibukota provinsi pusat kegiatan ekonomi dengan fasilitas pendidikan yang lengkap, memungkinkan penduduknya untuk memperoleh pendidikan yang tinggi dengan lebih mudah. Pada tahun 2023 sebagian besar penduduk yang berusia 15 tahun keatas berijazah SMA/ sederajat ke atas sebesar 62,48 persen. Sementara penduduk Kota Makassar yang

berijazah SD/ sederajat sebesar 13,09 persen, berijazah SMP/ sederajat sebesar 19,85 dan tidak memiliki ijazah sebesar 4,58 persen.

<https://makassarkota.bps.go.id>

KETENAGAKERJAAN

Berbicara mengenai pembangunan tentu tercakup didalamnya tentang tenaga kerja. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu hal penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin. Masalah yang timbul dalam ketenagakerjaan baik ditingkat nasional maupun regional adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan kesempatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja dari waktu ke waktu masih cukup tinggi, sementara pertumbuhan kesempatan kerja cukup rendah, akibatnya menimbulkan pengangguran, dan arus urbanisasi ke kota besar yang jelas-jelas tidak diinginkan oleh berbagai pihak. Dengan demikian pemerintah perlu strategi pembangunan yang berorientasi pada perluasan/pembukaan kesempatan kerja. Kemudian sejauhmana pemerintah mengambil strategi seperti itu dan menjalankannya seefektif mungkin, telah dianggap sebagai salah satu langkah yang penting artinya bagi keberhasilan pembangunan.

Secara internasional berdasarkan konsep dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, penduduk usia 15-64 tahun dikelompokkan sebagai tenaga kerja (*Man Power*), sedangkan di Indonesia menggolongkan penduduk usia 15 tahun keatas sebagai tenaga kerja. Batasan ini didasarkan pada kenyataan terdapat banyak penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja.

Melalui konsep *Labour Force Approach* dari bagian penduduk, tenaga kerja dapat dogolongkan mereka yang termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja adalah mereka yang bekerja (untuk meghasilkan barang dan jasa) maupun yang belum (sedang mencari pekerjaan). Tenaga kerja yang tidak termasuk angkatan kerja yaitu mencakup mereka yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, tidak mampu melakukan kegiatan dan lainnya.

Informasi ketenagakerjaan sangat penting terutama untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan diharapkan tidak hanya mengatasi masalah pengangguran tetapi juga

sekaligus meningkatkan taraf kesejahteraan para tenaga kerja dan peningkatan produktifitas secara makro. Dalam ketenagakerjaan dikenal berbagai indikator seperti tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), Tingkat pengangguran (TP), distribusi pekerja menurut sektor usaha.

6.1. Penduduk Menurut Jenis Kegiatan

Tabel 6.1 menyajikan persentase penduduk usia 15 tahun keatas menurut kegiatan utama selama seminggu yang lalu di Kota Makassar tahun 2021 dan 2022. Tabel ini menunjukkan bahwa dari seluruh penduduk angkatan kerja sekitar 52,26 persen penduduk usia 15 tahun keatas tergolong bekerja dan sekitar 7,01 persen yang sedang mencari pekerjaan pada tahun 2022.

Tabel 6.1
Penduduk Usia 15 tahun ke atas Menurut Kegiatan Utama Selama
Seminggu yang Lalu, di Kota Makassar, 2021 dan 2022

Tahun	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja		
	Bekerja	Mencari Kerja	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2021	51,84	7,87	10,75	22,00	7,54
2022	52,26	7,01	12,33	22,77	5,63

Sumber : BPS, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan 2021-2022

6.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu ukuran yang dapat menggambarkan partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. TPAK merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja yaitu jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (15 tahun keatas).

Tabel 6.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka
Usia 15 tahun Keatas Di Kota Makassar 2021 dan 2022

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
(1)	(2)	(3)
2021	59,70	13,18
2022	59,27	11,82

Sumber : BPS, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan 2021-2022

Dari tabel 6.2 disajikan indikator ketenagakerjaan pada tahun 2021 dan 2022. Pada rentang waktu tersebut menunjukkan trend penurunan TPAK dan peningkatan TPT. Pada tahun 2021 TPAK penduduk Kota Makassar sekitar 59,70 yang berarti dari 100 orang yang usia kerja sebanyak 59 orang penduduk yang masuk sebagai angkatan kerja sedangkan sisanya sebagai penduduk bukan angkatan kerja. Selanjutnya, pada tahun 2022 angka TPAK Kota Makassar mengalami sedikit penurunan menjadi 59,27.

Sementara itu, TPT kota Makassar pada tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan 2021, yaitu dari 13,18 menjadi 11,82. Penurunan pengangguran di tahun 2022 disebabkan karena kondisi perekonomian yang mulai bangkit pasca pandemi COVID-19. Menurunnya kasus COVID-19 membuat pemerintah menghilangkan pembatasan mobilitas masyarakat. Hal ini tentu menyebabkan meningkatnya berbagai aktivitas masyarakat yang dapat mempengaruhi pasar perekonomian. Sebagai dampaknya, pelaku usaha mengalami mulai mengalami peningkatan pendapatan. Meningkatnya pendapatan merupakan imbas dari berkurangnya pengangguran. Hal ini disebabkan oleh beberapa perusahaan mulai beroperasi dan kembali mempekerjakan pegawainya.

6.3. Lapangan Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan

Aktifitas ekonomi suatu wilayah dapat ditunjukkan melalui distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha. Tabel 6.3

memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi penduduk Kota Makassar terkonsentrasi pada sektor jasa. Pada tahun 2022, sektor Jasa menyerap 498.228 orang pekerja di kota Makassar. Artinya 77,44 persen penduduk Kota Makassar yang bekerja, bekerja di Sektor Jasa. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah laki-laki yang bekerja pada sektor jasa sebanyak 293.447 pekerja dan perempuan sebanyak 204.781 pekerja.

Selain sektor jasa, lapangan pekerjaan yang banyak mempekerjakan penduduk Kota Makassar adalah Sektor manufaktur yaitu sebanyak 136.825 pekerja. Sedangkan sektor yang paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian. Hal ini karena memang lahan pertanian di Kota Makassar relatif kecil.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, dari Tabel 6.3 terlihat bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kota Makassar 63,36 persennya adalah laki-laki. Artinya penduduk yang bekerja didominasi oleh laki-laki yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Tabel 6.3
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang
Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Kota
Makassar Tahun 2022

Lapangan Pekerjaan Utama	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	8.315	0	8.315
Manufaktur	105.895	30.930	136.825
Jasa	293.447	204.781	498.228
Jumlah	407.657	235.711	643.368

Sumber : BPS, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan 2022

Tabel 6.4
Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama
seminggu Yang Lalu menurut Jenis Pekerjaan Kota Makassar Tahun 2022

Jenis Pekerjaan	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Tenaga Profesional	41.282	40.836	82.118
Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	11.230	7.844	19.074
Tenaga Tata Usaha dan sejenisnya	39.602	29.023	68.625
Tenaga Usaha Penjualan	91.738	88.782	180.520
Tenaga Usaha Jasa	13.785	18.787	32.572
Tenaga Usaha Pertanian	7.595	0	7.595
Tenaga Produksi, Operator Alat angkutan dan Pekerja Kasar	183.199	44.971	228.170
Lainnya	19.226	5.468	24.694
Jumlah	407.657	235.711	643.368

Sumber : BPS, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan 2022

Berdasarkan tabel 6.4 terlihat bahwa sebagian besar tenaga kerja kota Makassar terserap di tenaga produksi, operator alat angkutan, dan pekerja kasar, yaitu sebanyak 228.170 orang diikuti oleh tenaga usaha penjualan sebanyak 180.520 orang. Hal ini dikarenakan sektor industri dan perdagangan merupakan sektor penyumbang terbesar untuk produk

domestik regional bruto Kota Makassar. Sementara itu, yang paling sedikit merupakan tenaga usaha pertanian, yaitu 7.595 orang.

6.4. Status Pekerjaan

Indikator ketenagakerjaan lainnya yang menunjukkan tingkat kesejahteraan adalah status pekerjaan penduduk, yakni kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha. Status pekerjaan dibedakan menjadi tujuh kategori, yakni berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non pertanian dan pekerja keluarga. Status pekerjaan ini dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui status pekerjaan formal dan informal. Indikasi berkembangnya sektor informal dapat dilihat melalui peningkatan jumlah pekerja dengan status berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga dan pekerja bebas. Status pekerjaan ini juga dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui status pekerjaan formal dan informal.

Pada Tabel 6.5 berikut ini, memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 2022, pekerja formal di Kota Makassar sebesar 369.070 orang dimana pekerja laki-laki sebesar 65,12 persen dan pekerja perempuan sebesar 34,88 persen. Sementara pada sektor informal sebanyak 274.298 orang, hal ini ditunjukkan melalui penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas non pertanian dan pekerja keluarga, dimana pekerja laki-laki sebesar 61 persen dan pekerja wanita sebesar 39 persen.

Tabel 6.5
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang
Lalu Menurut Status Pekerjaan Kota Makassar Tahun 2022

Jenis Pekerjaan	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	97.769	57.663	155.432
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	28.830	8.040	36.870
Berusaha dibantu buruh tetap	14.838	6.013	20.851
Buruh/karyawan	240.338	128.732	369.070
Pekerja bebas di pertanian	0	0	0
Pekerja bebas di non pertanian	11.488	776	12.264
Pekerja keluarga	14.394	34.487	48.881
Jumlah	407.657	235.711	643.368

Sumber : BPS, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan 2022

6.5. Lama Jam Bekerja

Salah satu ukuran untuk menentukan bagaimana produktifitas pekerja dan ukuran setengah pengangguran dan tenaga kerja penuh adalah jumlah jam bekerja yang digunakan pekerja untuk bekerja dalam seminggu. Batasan yang biasanya dipakai untuk mengukur jam kerja adalah lebih 35 jam/minggu, artinya jika yang bekerja kurang dari jam kerja normal dikatakan sebagai pekerja penganggur/setengah bekerja. Pada tabel 6.6 tampak bahwa terdapat 572.448 orang penduduk Kota Makassar yang bekerja selama 35 jam keatas dalam seminggu yakni 371.937 orang laki-laki dan 200.511 orang perempuan pada tahun 2022.

Tabel 6.6
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang
Lalu Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya di Kota Makassar Tahun 2022

Jumlah Jam Kerja Seluruhnya	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
0 *)	7.708	1.407	9.115
1-14	6.777	6.895	13.762
15-34	21.235	26.808	48.043
35+	371.937	200.511	572.448
Jumlah	407.657	235.711	643.368

Keterangan: 0*) = Sementara tidak bekerja

Sumber : BPS, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan 2022

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia disamping sandang dan pangan. Rumah selain berfungsi sebagai tempat istirahat atau berlindung dari hujan dan panasnya matahari, juga berfungsi sebagai tempat untuk membina kehidupan rumah tangga dan bersosialisasi antar individu dalam rumah dan mengembangkan diri. Pemerintah telah berupaya untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan rumah melalui berbagai program diantaranya menyediakan fasilitas kredit kepemilikan rumah (KPR).

Rumah dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur tingkat sosial masyarakat dan keberhasilan pembangunan di bidang perumahan. Keberadaan rumah yang dimaksud tidak saja menyangkut kuantitas tetapi juga mengenai kualitas rumah. Kondisi fisik bangunan menunjukkan kualitas dan kuantitas tempat tinggal yang dikuasai. Fisik bangunan yang kuat dan terbuat dari bahan yang tidak membahayakan menjamin keamanan penghuni tidak saja dari ancaman tindak kriminal, tetapi juga dari kerentanan bangunan itu sendiri dan kemungkinan terserang penyakit. Fisik bangunan yang kuat ditentukan oleh pemilihan bahan komponen bangunan yaitu lantai, dinding, dan atap. Fasilitas rumah yang tidak memadai dan kondisi lingkungan yang tidak sehat juga akan berpengaruh terhadap kesehatan.

7.1. Status Penguasaan Rumah

Indikator ini memperlihatkan status penguasaan rumah yang dibedakan atas milik sendiri dan bukan milik sendiri (kontrak, sewa, rumah dinas, bebas sewa dan lainnya). Pada umumnya rumah tangga yang memiliki tempat tinggal sendiri, diperkirakan tingkat kesejahteraannya lebih baik, dibanding mereka yang masih kontrak, sewa atau lainnya. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal sendiri disuatu daerah, akan semakin baik tingkat kesejahteraan daerah tersebut.

Tabel 7.1 memperlihatkan status penguasaan bangunan tempat tinggal oleh rumah tangga di Kota Makassar pada tahun 2022 dan 2023. Selama kurun waktu 2022-2023, terdapat sedikit penurunan pada penguasaan bangunan tempat tinggal dengan status milik sendiri. Pada tahun 2022, bangunan tempat tinggal yang ditempati oleh pemiliknya sendiri mencapai 71,08 persen, kemudian menurun menjadi 70,85 persen di tahun 2023. Sedangkan penduduk yang belum menempati rumah milik sendiri pada berdasarkan hasil susenas 2023 sebesar 29,15 persen.

Penguasaan tempat tinggal bukan milik sendiri oleh rumah tangga dipengaruhi beberapa faktor antara lain; keadaan ekonomi dan sosial masyarakat yaitu rendahnya pendapatan, alasan pendidikan, lokasi tempat kerja dan memilih tinggal bersama keluarga/sanak saudara.

Tabel 7.1
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Bangunan
Tempat Tinggal di Kota Makassar Tahun 2022 – 2023

Status Penguasaan	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Milik Sendiri	71,08	70,85
Bukan Milik Sendiri	28,92	29,15

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar Tahun 2022-2023

7.2. Kondisi Fisik Bangunan Tempat Tinggal

Kenyamanan tempat tinggal tidak bisa dipisahkan dari luas lantai dan jenis bahan bangunan, makin luas lantai hunian diimbangi dengan kualitas bahan bangunan yang digunakan makin baik pula kesejahteraan penghuninya. Luas lantai dan jenis bahan bangunannya, merupakan unsur penting dalam menciptakan kondisi kenyamanan dan kesehatan bagi penghuninya. Diperkirakan semakin luas lantai hunian dan semakin baik kualitas bahan bangunan yang digunakan akan menciptakan kondisi, yang semakin nyaman dan sehat bagi penghuninya.

Rata- rata luas lantai per anggota rumah tangga akan memberikan gambaran tentang tingkat kenyamanan suatu rumah bagi penghuninya. Jika

rata-rata anggota rumahtangga di Kota Makassar berkisar antara 4 sampai 5 orang, dan standar normatif luas lantai perkapita seluas 8 m² maka luas lantai hunian yang diharapkan setiap rumahtangga adalah berkisar antara 32 – 40 m².

Keadaan rumah tangga menurut luas lantai bangunan tempat tinggal selama tahun 2022 di tabel 7.2 menunjukkan bahwa rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai kurang dari 50 m² sekitar 29,18 persen. Selanjutnya rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai 50 – 99 m² sekitar 41,97 persen. Sementara itu, rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai 100 – 149 m², yakni 14,83 persen, sedangkan rumah tangga dengan lantai terluas lebih dari 150 m² mencapai 14,01 persen.

Secara umum dalam kurun waktu tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 kondisi fisik bangunan tempat tinggal di Kota Makassar menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen penduduk yang ada di Kota Makassar menempati rumah dengan luas diatas 50 m². Jika diasumsikan satu rumah tangga dihuni oleh 4-5 orang, maka lebih dari 50 persen rumah tangga yang ada di Kota Makassar menghuni rumah yang luas lantainya cukup layak.

Tabel 7.2
Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai di Kota Makassar Tahun 2021 dan 2022

Luas Lantai (m ²)	2021	2022
(1)	(2)	(3)
<50	30,66	29,18
50 – 99	37,82	41,97
100 – 149	16,00	14,83
150 +	15,52	14,01

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan 2021-2022

Keadaan rumah tangga di Kota Makassar menurut dinding terluas tahun 2021 dan 2022 disajikan pada tabel 7.3. Pada tabel ini jenis dinding

terluas dibagi dalam empat kelompok, yaitu jenis dinding tembok, kayu, bambu dan lainnya. Tabel 7.3 menunjukkan sebagian besar jenis dinding terluas yang dihuni oleh rumah tangga pada 2022 sudah berupa tembok, yaitu sebesar 90,31 persen, berupa kayu sebesar 5,53 persen, berupa bambu 0,44 persen dan jenis dinding lainnya sebesar 3,73 persen. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar dinding terluas di setiap rumah tangga di Kota Makassar sudah merupakan dinding yang permanen karena berupa tembok.

Tabel 7.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas di Kota Makassar Tahun 2021 dan 2022

Jenis Dinding	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Tembok	92,06	90,31
Kayu	7,88	5,53
Plesteran Anyaman bambu/Kawat	0,06	0,44
Seng/Lainnya	-	3,73

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan 2021-2022

Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga seseorang yang mendiami terlindung dari terik sinar matahari, hujan dan sebagainya. Untuk jenis bangunan bertingkat, yang dimaksud atap disini adalah bagian yang paling atas dari bangunan tersebut.

Pada tahun 2022 sebagian besar rumah tangga di Kota Makassar sudah menempati bangunan tempat tinggal dengan atap seng sebagai atap terluas, yakni mencapai 88,42 persen turun 2,23 persen dari tahun 2021. Sedangkan untuk atap genteng mengalami kenaikan dari 5,06 persen di tahun 2021 menjadi 7,91 persen di tahun 2023.

Tabel 7.4

**Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terlulus di Kota Makassar
Tahun 2021 – 2022**

Jenis Atap	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Beton	2,19	1,51
Genteng	5,06	7,91
Seng	90,65	88,42
Lainnya	2,10	2,16

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan 2021-2022

7.3. Fasilitas Sumber Air Mandi/Cuci/dll

Kenyamanan tempat tinggal juga tidak bisa dipisahkan dari kelengkapan, kelayakan dan penggunaan fasilitas tempat tinggal. Air merupakan kebutuhan yang vital, dibutuhkan oleh setiap orang. Air digunakan untuk minum, mandi dan mencuci. Sehat atau bersih tidaknya air yang digunakan akan bergantung pada sumbernya. Penggunaan air bersih dapat dijadikan indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan.

Semakin banyak rumah tangga yang memanfaatkan air bersih, menunjukkan semakin baiknya kondisi kesehatan rumah tangga. Demikian halnya dengan semakin banyaknya rumah tangga yang memiliki fasilitas air bersih sendiri cenderung semakin baik tingkat kesejahteraannya. Air bersih yang dianggap memenuhi syarat kesehatan adalah yang bersumber dari ledeng. Karena sebelum air didistribusikan ke rumah penduduk terlebih dahulu dilakukan proses penjernihan. Selain itu yang termasuk kategori air bersih adalah air yang bersumber dari pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Kebutuhan akan air bersih, terutama untuk bahan baku air yang berkualitas, bila ditinjau dari segi kesehatan dirasakan semakin hari semakin penting.

Rumah tangga di Kota Makassar tahun 2023 yang menggunakan Air Ledeng (PDAM) sebagai sumber air bersih menempati urutan pertama sumber air bersih yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dengan persentase sebesar 55,86 persen diikuti oleh sumur bor/pompa sebesar

36,32 persen. Sedangkan yang menggunakan sumur terlindung sekitar 7,10 persen dan mata air terlindung/tak terlindung/lainnya sekitar 0,09 persen.

Tabel 7.5
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Makassar
Tahun 2022 dan 2023

Sumber Air	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Air Kemasan/Isi Ulang	2,00	0,63
Ledeng	52,91	55,86
Sumur bor/pompa	38,04	36,32
Sumur terlindung/tak terlindung	6,13	7,10
Mata Air Terlindung/Tak Terlindung/lainnya	0,92	0,09

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar Tahun 2022-2023

7.4. Fasilitas Buang Air Besar

Fasilitas buang air besar merupakan salah satu fasilitas tempat tinggal yang sangat penting, karena berhubungan erat dengan sanitasi lingkungan tempat tinggal, terutama berupa penggunaan kloset dan tempat penampungan akhir kotoran/tinja. Fasilitas buang air besar yang dianggap memenuhi syarat kesehatan adalah kakus yang menggunakan kloset leher angsa atau plengsengan dengan penampungan akhir berupa tangki septik. Tangki septik dapat mencegah limbah untuk tidak mencemari lingkungan terutama air sumur yang dibuat/berada di sekitar tempat tersebut.

Dari tabel 7.6 dapat dilihat bahwa persentase rumah tangga dalam menggunakan tempat buang air besar dengan fasilitas tempat buang air besar digunakan oleh rumah tangga itu sendiri tahun 2022 sebesar 86,21 persen dan 92,76 persen tahun 2023 sedangkan untuk fasilitas tempat buang air besar yang lainnya (Bersama, MCK umum dan tidak memiliki fasilitas) pada tahun 2022 sebesar 13,79 persen dan 7,24 persen tahun 2023. Untuk tempat pembuangan akhir tinja rumah tangga di Kota Makassar pada

tahun 2023 sebagian besar menggunakan Tangki/IPAL/SPAL yaitu sebesar 99,61 persen.

Tabel 7.6
Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja Di Kota Makassar Tahun 2022 dan 2023

Fasilitas	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Fasilitas Tempat Buang Air Besar		
- Sendiri	86,21	92,76
- Lainnya *)	13,79	7,24
Tempat Pembuangan Akhir Tinja		
- Tangki/IPAL/SPAL	99,92	99,61
- Lainnya	0,08	0,39

Keterangan: *) Lainnya = Termasuk fasilitas bersama, MCK Umum, dan tidak memiliki fasilitas

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar Tahun 2022-2023

INDIKATOR LAINNYA

Pengeluaran rumah tangga dapat dibedakan menurut pengeluaran makanan dan bukan makanan yang menggambarkan bagaimana penduduk Kota Makassar mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Walaupun harga antar daerah berbeda, nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk, khususnya dilihat dari segi ekonomi.

8.1. Pengeluaran Perkapita Sebulan

Tabel 8.1 menggambarkan pengeluaran perkapita sebulan menurut kelompok komoditas (makanan dan bukan makanan) dan kelompok pengeluaran (40 persen bawah, 40 persen tengah, dan 20 persen atas). Tahun 2023, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan di Kota Makassar sebesar Rp 1.735.127 yang dibagi menjadi pengeluaran untuk makanan sebesar Rp 722.074 atau 41,62 persen dan bukan makanan sebesar Rp 1.013.053 atau 58,38 persen.

Tabel 8.1

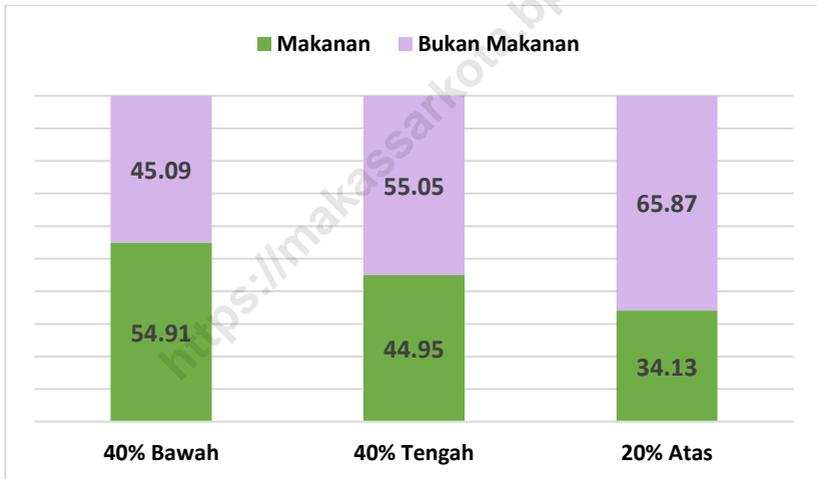
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran di Kota Makassar Tahun 2023

Komoditas	Pengeluaran Perkapita Sebulan			
	40% Bawah	40% Tengah	20% Atas	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Padi-Padian	64.002	87.304	104.909	81.501
Umbi-Umbian	2.382	6.008	13.004	5.958
Ikan	56.379	104.906	164.482	97.411
Daging	8.191	28.431	87.164	32.092

Komoditas	Pengeluaran Perkapita Sebulan			
	40% Bawah	40% Tengah	20% Atas	Rata- Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Telur Dan Susu	18.255	40.750	87.907	41.189
Sayur-Sayuran	26.300	45.613	81.604	45.090
Kacang-Kacangan	6.784	10.252	20.387	10.893
Buah-Buahan	10.214	31.351	81.054	32.844
Minyak Dan Kelapa	10.670	15.600	26.982	15.906
Bahan Minuman	10.174	16.455	26.127	15.878
Bumbu-Bumbuan	10.873	16.779	29.709	17.005
Konsumsi Lainnya	8.037	12.457	21.613	12.522
Makanan Dan Minuman Jadi	120.947	240.245	520.589	248.633
Rokok Dan Tembakau	41.131	73.478	96.580	65.155
Total Makanan	394.340	729.629	1.362.112	722.074
Perumahan Dan Fasilitas Rumah Tangga	205.338	523.274	1.392.134	570.007
Aneka Barang Dan Jasa	64.735	196.219	646.414	233.746
Pakaian, Alas Kaki, Dan Tutup Kepala	14.250	44.432	106.676	44.816
Barang Tahan Lama	8.435	35.780	145.040	46.715
Pajak, Pungutan Dan Asuransi	28.953	77.219	189.538	80.392
Keperluan Pesta Dan Upacara/Kenduri	2.147	16.764	148.906	37.377
Total Bukan Makanan	323.858	893.688	2.628.708	1.013.053
Total Pengeluaran	718.198	1.623.317	3.990.820	1.735.127

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar Tahun 2023

Komoditas pengeluaran makanan terbesar adalah komoditas makanan dan minuman jadi sebesar Rp 248.633 atau 34,4 persen dari rata-rata pengeluaran makanan dan yang terkecil adalah komoditas umbi-umbian yaitu Rp 5.958 atau hanya 0,83 persen saja dari rata-rata pengeluaran makanan. Sedangkan untuk komoditas pengeluaran bukan makanan yang terbesar adalah komoditas perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar Rp 570.007 atau 56,27 persen dari total pengeluaran bukan makanan dan yang terkecil adalah komoditas keperluan pesta dan upacara/kenduri sebesar Rp 37.377 atau 3,69 persen dari total pengeluaran bukan makanan.



Gambar 8.1
Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Makassar Tahun 2023

Berdasarkan Gambar 8.1 dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pola konsumsi pada ketiga kelompok pengeluaran. Pada kelompok 40 persen bawah didominasi oleh pengeluaran makanan, sedangkan pada kelompok 20 persen atas didominasi oleh pengeluaran bukan makanan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kelompok pengeluarannya maka

semakin kecil konsumsi makanannya dan semakin besar konsumsi bukan makanannya.

8.2. Kemiskinan

BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Standar ini disebut garis kemiskinan yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara dengan 2.100 kalori energi perkapita perhari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling pokok.

Penduduk dengan pengeluaran perkapita di bawah garis kemiskinan diklasifikasikan sebagai penduduk miskin demikian pula penghitungan untuk penduduk fakir miskin. Pemanfaatan data kemiskinan yang dihasilkan oleh BPS biasanya digunakan Pemerintah untuk perencanaan makro, khususnya untuk menentukan alokasi dan besaran dana untuk membantu penduduk miskin dan fakir miskin, baik untuk tingkat nasional maupun tingkat wilayah.

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau sedikitnya bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain “seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin”.

Kemiskinan secara konseptual dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar

penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (garis kemiskinan makanan) ditambah kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang, yaitu papan, sandang, sekolah dan transportasi serta kebutuhan individu dan rumah tangga dasar lainnya (garis kemiskinan non makanan). Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Tabel 8.2
Jumlah Penduduk Miskin, Persentase, dan Garis Kemiskinan di Kota Makassar Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Penduduk Miskin (000)	65,12	69,98	74,69	71,83	80,32
Persentase Penduduk Miskin	4,28	4,54	4,82	4,58	5,07
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	418.831	442.513	475.444	511.081	570.286

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Susenas 2019-2023

Berdasarkan tabel 8.2 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding tahun 2022. Secara absolut jumlah penduduk miskin naik pada periode 2023 sebesar 8,49 ribu jiwa, yaitu dari 71,83 ribu jiwa tahun 2022 menjadi 80,32 ribu jiwa tahun 2023. Secara persentase, penduduk miskin di Kota Makassar juga mengalami kenaikan dari tahun 2022 ke 2023, yaitu dari 4,58 persen di tahun 2022 menjadi 5,07 persen di tahun 2023. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Makassar tahun 2023 dipengaruhi oleh kenaikan harga-harga sembako dan BBM. Kenaikan harga-harga yang tinggi ini tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan penduduk Kota Makassar sehingga menambah jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan menjadi penduduk miskin.

Jika dilihat dari garis kemiskinan, pada tahun 2019 sampai tahun 2023 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, garis kemiskinan di Kota Makassar adalah Rp 418.831 perkapita perbulan meningkat sebesar Rp 151.455 menjadi Rp 570.286 perkapita perbulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (2021). *Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 Hasil Sensus Penduduk 2020*. Makassar: BPS Kota Makassar
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (2022). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2022*. Makassar: BPS Kota Makassar
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (2023). *Kota Makassar Dalam Angka 2023*. Makassar: BPS Kota Makassar
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (2023). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2023*. Makassar: BPS Kota Makassar
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2021). *Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan Agustus 2021*. Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2021). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan 2021*. Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2022). *Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan Agustus 2022*. Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2022). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan 2022*. Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MAKASSAR
Jl. Prof. Abdurrahman Basalamah I, Kel.Karampuang,
Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
Telp: (0411) 442698; Email : bps7371@bps.go.id;
Homepage : <https://makassarkota.bps.go.id>